

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Haris Semendawai, *et.al.*, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta

Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Cet. I*. Pradnya Paramita. Jakarta

A.Z. Abidin. 2009. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

----- . 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenamedia Group. Hlm. Jakarta

----- . 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Brewer – Caria dari J. J Rousseau, sebagaimana dikutip Marwan Effendy, 2014. *Teori Hukum Dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta, Referensi.

Edy Suhardono. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Erdianto Efandi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Frans Magnis Suseno, 2016, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Media Indonesia. Jakarta.

-----, 2006. *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*. Bandung.

-----, 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*. BEE. Media Indonesia. Jakarta.

Hendra Budiman, 2016, *Kesaksian Edisi II*, LPSK, Jakarta.

Herlin Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

H. Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

I Dewa Gede Palguna, 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.

Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

_____, 2020. *Refleksi Hukum di Indonesia*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

_____, 2re020. *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Edisi kelima Tahun 2016*. Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Kartini Kartono, 2003. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta.

Lies Sulistiani, et. Al, s.a., *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja Rosdakarya*. Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*. PT.Alumni. Bandung,
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2015. *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHP dan Ketentuanketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan*, Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2012. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. cetakan ketiga. Alumni. Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon.1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.Surabaya.
- R. Wiyono, 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 335-337.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

- . 2001. *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hokum*. Mandar maju. Bandung.
- . 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2000. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Sarwoto, 1990. *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*, Ghala Indonesia. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum.*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- . 1983. *Permasalahan Hukum di indonesia*. Alumni. Bandung.
- 1998. *Permasalahan Hukum di indonesia*. Alumni. Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak. cet. ke-1*. CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta
- Sidik Sunaryo, 2005, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Press, Malang
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Teguh dan Aria. 2011. *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2001. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Widjaya, Amin Tunggal. 1993. *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka cipta jaya. Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Laporan Penelitian dan Naskah Akademik

Febriansyah, *et all*, 2011, *Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Indonesia Corruption Watch-Kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Jakarta.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011. *Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”,(dibuat dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban), Jakarta

Makalah dan Artikel Jurnal

Jumiati, 2006, *Materi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Demokrasi Vol. V No. 2.

- Kenneth J. Peak sebagaimana dikutip, I Gede Winartha Indra Bhawana, 2016, *Independensi Dan Imparsialitas Hakim Perspektif Teoritik – Praktik Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 5, Magister Hukum Udayana, No. 1 : 184 – 201
- Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik* Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010: 195 – 216.
- Marjanne Termorshuizen, 2004, *The Concept Rule of Law*, dalam “*JENTERA Jurnal Hukum*”, Edisi 3 tahun II, Jakarta.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya, S.H.,M.Kn, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian*, Vyavahara Duta, Jurnal Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum, Vol.IX no.1.
- Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2007, *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema “Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia”, United States Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT), Hotel Grand Mahakam Kebayoran Baru, Jakarta, 12 – 14 Juni 2007,
- Mardjono Reksodiputro, 2013. *Beberapa catatan tentang Justice Collaborator dan Bentuk Perlindungannya*, suatu makalah yang disampaikan dalam diskusi di KPK Jakarta, 14 Mei 2013.
- Mas Achmad Santosa, 2011. *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators)*, makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Sumber Internet

- Jimly Assidqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, trial::http://www.docudesk.com.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Konvensi Internasional

United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003, *Article 37 Point 3*.

